

Makan Bergizi Gratis Ditanggung APBN



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 14/01/2025

TENGGARONG - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Menurut Akmal, sejauh ini simulasi makan bergizi gratis masih berjalan sesuai arahan pusat. Pemprov, kata dia, juga belum menerima informasi berapa anggaran yang diterima untuk menjalankan program itu pada tahun ini.

"Saat ini masih dipegang oleh APBN. Simulasi ini hanya contoh belum ada arahan nasional untuk MGB, kata Akmal, saat kunjungan ke Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Tenggarong, Senin (13/1).

Akmal datang ke SLBN Tenggarong untuk melihat pemberian makan bergizi gratis di sekolah itu. Nampak hadir dalam kunjungan itu Anggota DPR RI Sarifah Suraida, Anggota DPD RI Yulianus Henock, Gubernur Kaltim terpilih Rudy Mas'ud, dan Sekretaris Daerah Kukar Sunggono.

Kata Akmal, perlu pembahasan lebih lanjut dari segi anggaran hingga sarana dan prasarana (sapas) pendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Sebab menurut Akmal, bisa salah dalam proses penganggaran akan menjadi temuan oleh BPK RI.

"Program ini dari pusat maka harus dibayar oleh pusat. Begitu pun program daerah akan dibayar langsung oleh daerah, tidak boleh kuantiti," ucapnya. Meski begitu, Akmal menyatakan apabila ada perintah pusat agar program itu dialihkan ke provinsi maka pihaknya akan menganggarkan.

Sekda Kukar, Sunggono menyebutkan pihaknya masih menunggu arahan dari Pemprov Kaltim untuk merealisasikan Program Makan Bergizi Gratis. Kukar, kata Sunggono, siap merealisasikan program itu hingga ke sekolah-sekolah yang berada di pelosok.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim telah menjadikan SLB Kukar sebagai *locus* pemberian makanan bergizi gratis, harapannya bisa konsisten ke depannya," ujarnya.

Sunggono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis berbeda dengan tambahan makanan bagi balita terindikasi *stunting* yang digagas oleh Bupati Edi Damansyah. Kedua program ini nantinya akan berjalan sesuai dengan sasarannya masing-masing.

"Semua sudah terjawab dan MGB ini dua hal yang berbeda, yang sudah kita laksanakan pemberian makanan tambahan untuk anak-anak berpotensi *stunting* dan MGB ini khusus untuk anak sekolah," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI telah menyetujui anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025. Anggaran itu nantinya akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

Anggaran sebesar Rp71 triliun ini diyakini tidak akan cukup sehingga pada Perubahan APBN pertengahan tahun nanti akan dilakukan penambahan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memperkirakan butuh anggaran Rp210 triliun agar program ini bisa terealisasi hingga akhir tahun. (ea624/ sh/cy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Makan Bergizi Gratis Ditanggung APBN, 14/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Locus merupakan kata serapan dari bahasa latin yang berarti "tempat" atau "kedudukan".